

**KAJIAN SISTEM PERLADANGAN DI KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
(STUDI KASUS PERLADANGAN DI WILAYAH KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
PRODUKSI UNIT I, KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW)**

**Susilaningsih Lasabuda
Hengki Djemie Walangitan
Nurdy Waney**

ABSTRACT

The study aims to (1) Describe the characteristics of shifting cultivation ecology in the area of Production Forest Management Unit (KPHP) unit I, (2) Describe the economic and social cultural characteristics of padang in the area of Production Forest Management Unit (KPHP) Unit I of Bolaang Mongondow Regency, Assess management strategies in the area of Production Forest Management Unit (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow. This research was conducted from January to April 2016. in the unitary area of production forest management (KPHP) unit I scattered in 3 (Three) Dumoga District, Lolak District, and District Bolaang, Bolaang Mongondow District. The data collection of ecological, economic and socio-cultural inventory of activities of the community used qualitative and quantitative methods. The data obtained through four data collection techniques are: Study of literature, Observation, Interview, discussion is limited. Development of management strategies used SWOT analysis. Primary data is data obtained directly in the field while secondary data obtained from libraries, government agencies, and the internet. The result of the research shows that there are 11 (eleven) strategies considered as priority in achieving the objectives of forest area management in KPHP unit I as follows: (1) Maintaining commitment and raising community participation; (2) Improving the management capacity of KPHP area unit I to build cooperation and integrated and sustainable programs with related institutions; (3) Developing integrated partnerships; (4) Socializing legislation to stakeholder related to KPHP and region; (5) Conducting guidance on KPHP unit I staff related to forest area management; (6) Allocating forest and land management activities in KPHP units; (7) Establishing institutions; (8) Conducting village land use activities within KPHP units; (9) Conducting mapping activities on participatory land ownership; (10) Conducting community empowerment by involving all stakeholder; (11) Conducting regional boundary and reconstruction arrangements.

Keywords: cultivation system, SWOT analyst, KPHP Area Unit I, Bolaang Mongondow Distric

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan karakteristik ekologi perladangan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit I, (2) Mendeskripsikan karakteristik ekonomi dan sosial budaya perladang di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow, (3) Mengkaji strategi pengelolaan di wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Januari sampai bulan April 2016. di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I yang tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Dumoga, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondow. Pengumpulan data kegiatan inventarisasi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif. Data yang di peroleh melalui empat teknik pengumpulan data yaitu: Studi literatur, Observasi, Wawancara, diskusi terbatas. Pengembangan strategi pengelolaan menggunakan analisis SWOT. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan sedangkan data sekunder diperoleh dari pustaka, instansi pemerintah, dan internet. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 (sebelas) strategi yang dianggap prioritas dalam pencapaian tujuan pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPHP unit I yaitu sebagai berikut (1) Menjaga komitmen dan menggalang partisipasi masyarakat (2). Meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah KPHP unit I membangun kerjasama serta program terpadu dan berkelanjutan dengan instansi terkait (3). Mengembangkan kemitraan terpadu (4) Mensosialisasikan peraturan perundangan kepada stakeholder yang berkaitan dengan KPHP dan kawasan (5) Melakukan pembinaan terhadap staf KPHP unit I yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan (6) Mengalokasikan kegiatan pengelolaan hutan dan lahan pada unit KPHP (7) Membentuk kelembagaan masyarakat dan pemerintah serta mengumpulkan data tentang keinginan, persepsi serta sosial budaya masyarakat (8) Melakukan kegiatan tata guna lahan desa di dalam unit KPHP (9) Melakukan kegiatan pemetaan terhadap kepemilikan lahan secara partisipatif (10) Melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan seluruh stakeholder (11) Melakukan penataan batas dan rekonstruksi kawasan.

Kata kunci: sistem perladangan, analis SWOT, Wilayah KPHP Unit I, Kabupaten Bolaang Mongondow

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Di Sulawesi Utara, laju kerusakan lahan dan hutan per tahun masih cukup tinggi. Berdasarkan data spasial lahan kritis pada tahun 2004 luas lahan dengan kategori sangat kritis seluas $\pm 27,907$ ha dan kritis seluas $\pm 228,227$ ha. Pada tahun 2009 luas lahan dengan kategori sangat kritis seluas $\pm 32,328$ ha dan kritis seluas $\pm 242,560$ ha. Pada tahun 2013 luas lahan kritis meningkat sekitar 261,346,5 ha dan lahan sangat kritis sekitar 33,797,77 ha (BP DAS Tondano, 2014). Pertambahan luas lahan kritis tersebut di antaranya disebabkan oleh aktifitas perladangan dalam kawasan hutan. Perladangan dalam kawasan hutan di Sulawesi Utara telah menjadi masalah utama dalam kaitan dengan degradasi hutan. Aspek ekologi dampak yang ditimbulkan seperti banjir, longsor, hilangnya keanekaragaman hayati serta kerugian perekonomian hayati. Aspek ekonomi kerugian yang ditimbulkan di antaranya hilangnya potensi pendapatan negara dari industri hasil hutan kayu dan non kayu, serta dampak turunannya (*multiplier effect*). Menurut Galudra *et al.* (2006), perladangan adalah bentuk konflik sistem penguasaan lahan akibat dari sifat sumberdaya hutan yang open akses. Di Indonesia upaya pengendalian perladangan dalam kawasan hutan terus dilakukan melalui berbagai program diantaranya program KANITAP (Kawasan Pertanian Menetap) serta kegiatan reboisasi yang dilakukan sejak tahun 1976 dengan diterbitkannya Inpres Reboisasi dan Penghijauan hingga Tahun 2001 dengan Program GNRHL (Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan). Berbagai kebijakan yang diharapkan dapat mendorong terwujudnya kelestarian hutan dan kesejahteraan masyarakat serta mengakomodasi tuntutan kepentingan daerah diluncurkan oleh pemerintah pusat. Kebijakan tersebut adalah PP Nomor 6 Tahun 2007 tentang tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan serta pemanfaatan hutan, dalam PP tersebut yang dimaksud KPH (kesatuan pengelolaan hutan) sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari, hal mendasar yang diharapkan dari pembentukan KPH tersebut adalah meningkatnya efektifitas pembangunan kehutanan dalam upaya pencapaian pengelolaan hutan lestari sehingga dapat terus mengurangi laju degradasi hutan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, stabilnya penyediaan hasil hutan, dan berkembangnya tata pemerintahan yang baik dalam pengelolaan hutan. Sistem ini merupakan terobosan baru setelah sebagian besar kawasan hutan tersebut mengalami kemunduran baik kualitas maupun kuantitas pasca pengelolaan hutan model HPH (Hak Pengusahaan Hutan). Pada dasarnya sistem KPH menerapkan asas desentralisasi dan memberikan hak kepemilikan (*property right*) hingga

pada tingkat tapak sehingga kerusakan yang diakibatkan oleh sifat sumberdaya yang tidak dapat dipilah (*non-excludable*) dapat di atasi. Hak kepemilikan (*property right*) adalah suatu bentuk penguasaan dan pengusahaan secara hukum yang diharapkan dapat terbangun sistem pemanfaatan yang berkelanjutan karena pihak pengelola merasa memiliki dengan tugas dan bertanggung jawab yang jelas dan terukur, dengan adanya hak tersebut maka kewenangan untuk mengatur dan membatasi dapat diterapkan sehingga tujuan pengelolaan hutan berkelanjutan dapat di wujudkan (Walangitan, dkk. 2014).

Berdasarkan surat keputusan Menteri Kehutanan nomor 796/Menhut-II/ 2009 wilayah kabupaten Bolaang Mongondow terbagi atas 2 wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) yaitu KPHP Unit I dan KPHP Unit II. Areal KPHP unit I Bolaang Mongondow memiliki karakteristik khusus yang spesifik diantaranya terletak diareal dengan aksesibilitas tinggi kemudian konflik dengan masyarakat tergolong tinggi dalam bentuk aktivitas perladangan dilain pihak terdapat potensi sosial ekonomi budaya yang dapat dikembangkan pengelolaan berbasis partisipasi masyarakat. Kawasan hutan ini berada pada ketinggian sekitar 600 sampai 900 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas 20,699 Ha. Secara geografis daerah ini terletak pada $1^{\circ} 06' - 1^{\circ} 20'$ Lintang Utara dan $124^{\circ} 45' - 124^{\circ} 58'$ Lintang Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan, kawasan ini berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terbagi atas 3 (tiga) wilayah Kecamatan yaitu Kecamatan Lolak, Kecamatan Dumoga Timur, dan Kecamatan Bolaang. Kawasan hutan wilayah KPHP unit I terdiri atas hutan lindung (HL) hutan produksi tetap (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT). Kendala yang dihadapi dalam implementasi pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I tersebut adalah adanya aktifitas perladangan dalam kawasan, Langi dan Walangitan (2013) melaporkan bahwa sekitar 25 persen dari luas kawasan hutan tersebut telah menjadi perladangan, sehingga diperlukan upaya yang tepat agar masyarakat peladang dapat menjadi mitra pengelolaan hutan. Pengelolaan sistem KPHP (Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi) merupakan salah satu solusi mengatasi masalah tenurial pengelolaan kawasan hutan di luar jawa, pada prinsipnya semua pihak terlebih masyarakat disekitar diberikan akses terbuka secara legal untuk berpartisipasi dalam pengelolaan untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan hutan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi budaya masyarakat dengan mengacu kepermasalahan tersebut maka penelitian ini dilakukan untuk merumuskan pengelolaan hutan diareal kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I.

Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian dirumuskan menjadi beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana karakteristik ekologi perladangan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Bagaimana karakteristik sosial ekonomi dan budaya peladang di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I di Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Bagaimana strategi pengelolaan kawasan untuk menjamin terwujudnya pengelolaan kawasan hutan dengan mempertimbangkan aspek ekologi, aspek ekonomi dan aspek sosial budaya masyarakat.

Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan karakteristik ekologi perladangan di Wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow.
2. Mendeskripsikan karakteristik ekonomi, dan sosial budaya peladang di Wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow.
3. Mengkaji strategi pengelolaan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I di Kabupaten Bolaang Mongondow

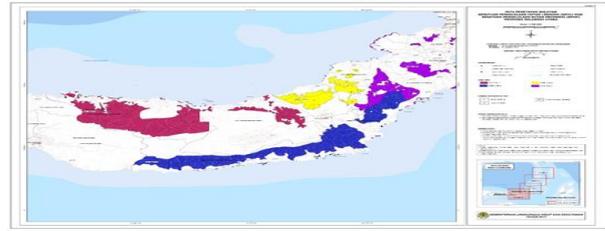
Manfaat Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini menghasilkan informasi tentang karakteristik ekologi, ekonomi dan sosial budaya perladangan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow dan sebagai bahan pertimbangan atau rekomendasi bagi pembangunan di sektor pertanian dan kehutanan dalam upaya pengelolaan lahan maupun areal hutan yang berwawasan lingkungan, sehingga tingkat kemerosotan lahan serta dampaknya dimasa yang akan datang bisa di perkecil. Informasi ilmiah ini bermanfaat pula bagi upaya pengembangan model pemberdayaan peladang, menyusun strategi pengelolaan hutan produksi berbasis masyarakat.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 4 (empat) bulan yaitu bulan Januari- April 2016. Lokasi penelitian adalah di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I yang terletak di Kabupaten Bolaang Mongondow. Lokasi wilayah KPHP unit I tersebar di 3 (Tiga) Kecamatan yaitu Dumoga, Kecamatan Lolak, dan Kecamatan Bolaang yang terdiri dari 15 (Lima belas) desa sekitar hutan dengan desa sampel yaitu Desa Pindolili, Desa Pindol, dan Desa Totabuan. Yang dapat dilihat pada Gambar 1. Peta wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I sebagai berikut:



Gambar 1. Peta wilayah KPHP unit I

Jenis dan sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diukur langsung di lapangan sedangkan data sekunder bersumber dari literatur meliputi :

1. Peta kawasan Hutan wilayah KPHP unit I
2. Peta administrasi pemerintahan Kecamatan Lolak
3. Data Biofisik kawasan hutan (KPHP) unit I
4. Data Sosial ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
5. Data-data lainnya yang menyangkut dengan pengelolaan KPHP unit I.

Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data kegiatan inventarisasi ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif

1. Metode kualitatif

Penelitian kualitatif digunakan untuk memperoleh data tentang persepsi, menggali sejarah kepemilikan lahan, kebijakan pemberdayaan masyarakat, interaksi masyarakat dengan sumber daya hutan, konflik kawasan, serta pemanfaatan sumber daya hutan oleh masyarakat maupun pemerintah. Untuk memperoleh data tersebut diperlukan 4 (empat) teknik pengumpulan data, yaitu (1) Studi literatur, (2) Observasi, (3) Wawancara, dan (4) Diskusi terbatas.

2. Metode kuantitatif

Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui tingkat ketergantungan masyarakat terhadap kawasan hutan. metode pengumpulan data menggunakan kuisioner (daftar isian) dengan sumber informasi adalah responden. Jumlah responden pada masing-masing desa sampel sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Pemilihan responden didasarkan pada pertimbangan jenis mata pencaharian yaitu petani kebun, petani ladang.

Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk memperoleh gambaran strategi yang akan di gunakan untuk pencapaian tujuan (KPHP) unit I yaitu dengan menggunakan pendekatan dengan menghitung NU (Nilai Urgensi), ND (Nilai Dukungan), NK (Nilai Keterkaitan) yang masing-masing menggunakan skala Likert 1-5 dimana nilai 5 lebih tinggi dibandingkan 4 dan seterusnya. Proses perhitungan mengikuti prosedur. Walangitan dkk (2013) sebagai berikut :

a. Memilih dan menentukan faktor prioritas, yaitu:

1. Pembobotan Nilai Urgensi (NU)

Nilai urgensi digunakan untuk menentukan tingkat urgensinya pada masing-masing faktor terhadap pencapaian tujuan dan faktor di beri bobot antara 1 sampai dengan 5, tergantung tingkat urgensinya yaitu:

1. Nilai urgensi 5, menyatakan sangat tinggi nilai urgensinya
2. Nilai urgensi 4, menyatakan tinggi nilai urgensinya
3. Nilai urgensi 3, menyatakan cukup tinggi nilai urgensinya
4. Nilai urgensi 2, menyatakan kurang tinggi nilai urgensinya
5. Nilai urgensi 1, menyatakan sangat kurang tinggi nilai urgensinya

2. Pembobotan Nilai Dukungan (ND)

Nilai dukungan disini digunakan untuk menunjukkan besarnya dukungan setiap faktor baik bersifat mendorong maupun menghambat terhadap pencapaian tujuan dan diberi bobot 1 sampai 5 tergantung tingkat dukungannya, yaitu:

1. Nilai dukungan 5, menyatakan sangat kuat dukungannya, sangat kuat hambatannya
2. Nilai dukungan 4, menyatakan kuat dukungannya, kuat hambatannya
3. Nilai dukungan 3, menyatakan cukup kuat dukungannya cukup kuat hambatannya
4. Nilai dukungan 2, menyatakan kurang kuat dukungannya kurang kuat hambatannya
5. Nilai dukungan 1, menyatakan sangat kurang kuat dukungannya sangat kurang kuat hambatannya

3. Nilai keterkaitan (NK)

Nilai keterkaitan akan menunjukkan besarnya keterkaitan satu faktor pada faktor-faktor lainnya terhadap pencapaian tujuan dan diberi bobot 0 sampai 5 tergantung dari kuatnya keterkaitan masing-masing faktor dengan faktor lainnya, yaitu :

1. Nilai keterkaitan 5, menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antar faktor
2. Nilai keterkaitan 4, menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antar faktor
3. Nilai keterkaitan 3, menunjukkan adanya keterkaitan yang cukup kuat antar faktor
4. Nilai keterkaitan 2, menunjukkan adanya keterkaitan yang kurang kuat antar faktor
5. Nilai keterkaitan 1, menunjukkan adanya keterkaitan yang sangat kuat antar faktor
6. Nilai keterkaitan 0, menunjukkan tidak adanya keterkaitan antar faktor

Evaluasi faktor internal utama dan faktor eksternal utama digunakan rumus dalam penghitungan bobot :

1. Bobot Faktor (BF) = $UN : \sum NU \times 100\%$
2. Nilai Bobot dukungan (NBD) = $BF \times ND : 100\%$
3. Nilai Rata-Rata Keterkaitan (NRK) = $NK : \text{Jumlah faktor}$

4. Nilai Bobot Keterkaitan (NBK) = $NRK \times BF : 100\%$

5. Total Nilai Bobot (TNB) = $NBD + NBK$

Setelah memperoleh nilai total nilai bobot (TNB) maka dilakukan pemberian ranking pada masing-masing faktor berdasarkan nilai TNB terbesar. Berdasarkan hasil ranking inilah yang akan digunakan dalam memilih dan menentukan faktor kunci keberhasilan prioritas.

a. Pendekatan kualitatif matriks SWOT

Penyusunan strategi dalam rangka pencapaian tujuan untuk pembangunan KPHP unit I adalah upaya memanfaatkan kekuatan dan peluang yang ada guna mengeliminasi kelemahan dan ancaman yang di hadapi. Penyusunan strategi untuk mencapai tujuan dapat menggunakan matriks SWOT sebagai berikut:

Dari masing-masing faktor internal dibandingkan dengan faktor eksternal untuk memperoleh strategi apa yang akan di lakukan dalam memecahkan masalah dari 2 faktor yang dibandingkan tersebut. Berdasarkan dari matrik SWOT maka akan di peroleh minimal 4 strategi yang akan digunakan untuk pencapaian tujuan. Namun demikian dari strategi yang di peroleh dari matrik SWOT dapat dilakukan pemilahan untuk menjadi strategi prioritas yang akan di gunakan untuk pencapaian tujuan. Secara garis besar tahapan yang dilakukan untuk memperoleh strategi agar mencapai tujuan pengelolaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Biofisik

Letak dan Luas

Areal wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I Kabupaten Bolaang Mongondow berada pada ketinggian sekitar 600 sampai puncak gunung sekitar 900 meter dari permukaan laut (mdpl) dengan luas 20.699 Ha. Secara geografis daerah ini terletak pada 1° 06'-1°20' Lintang Utara dan 124° 45'-124° 45'-124° 58' Lintang Selatan. Berdasarkan wilayah administrasi pemerintahan kawasan ini berada dalam wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow yang terbagi atas 3 wilayah kecamatan yaitu Kecamatan Lolak, Dumoga Timur dan Bolaang yang meliputi sekitar 15 desa sekitar hutan. Hasil analisis spatial tataguna hutan, wilayah KPHP unit I terdiri atas 3 fungsi kawasan yaitu kawasan Hutan lindung (HL), Hutan produksi terbatas (HPT) dan Hutan produksi tetap (HP) dengan luas masing-masing disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Luas kawasan wilayah KPHP unit I menurut Tataguna hutan

Nama Kawasan Hutan	Luas (ha)
HL. S. Tuodan I	1612.24
HL. S. Tuodan II	921.99
HL. Labuan uki	527.37
Sub Total HL	3061.60
HP S. Onggak mongondow	6714.42
HPT. Labuan uki	4922.45
HPT. S. Onggak dumoga	6001.45
Sub total HPT	10923.90
Grand total	20699.92

Sumber : Dihitung pada peta wilayah KPHP unit I

Kondisi Topografi

Keadaan topografi kawasan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I sebagian besar mempunyai relief bergelombang sampai berbukit. Kondisi lereng di dominer lereng curam hingga sangat curam sekitar 85 %, sisanya berlereng landai hingga agak curam. Secara rinci luas kawasan menurut kelas lereng.

Kondisi tutupan lahan

Data penggunaan lahan diperoleh dari interpretasi citra satelit (2011) menunjukkan bahwa terdapat 8 jenis tutupan lahan. Pada kawasan hutan lindung tutupan lahan didominasi oleh hutan sekunder dan semak belukar sisanya berupa perladangan. Kondisi tersebut relative sama pada kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Sedangkan pada areal HPT sekitar 75 % dari luas areal berupa hutan sekunder dan sekitar 20 % adalah perladangan. Kawasan hutan produksi (HP) dan hutan produksi terbatas (HPT) yang telah dirambah menjadi areal perladangan sekitar 5400 ha.

Karakteristik ekologi peladang di wilayah KPHP unit I

Kegiatan utama masyarakat sekitar hutan hakikatnya terdiri atas pengelolaan lahan untuk kegiatan pertanian. Berdasarkan survey hasil tata guna lahan dapat dibedakan menjadi lahan pemukiman, pertanian, dan hutan tetap. Lahan pertanian adalah lahan pertanian yang digunakan untuk berladang dan berkebun, serta lahan-lahan yang di *berakan*. Hutan tetap adalah hutan-hutan yang d lindungi oleh peraturan desa. Pekerjaan wajib yang harus dilakukan oleh masyarakat sekitar hutan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I adalah berladang (bertanam di lahan kering). Kegiatan sehari-hari masyarakat adalah menangani setiap ladangnya. Waktu libur hari jumat dan minggu yang biasanya di gunakan untuk kegiatan sosial disetiap kampungnya. Kegiatan berladang di laksanakan satu kali dalam setahun yang kemudian lahannya di *bera-kan* selama 3-5 tahun.

Dalam lima tahun terakhir sebagian masyarakat mulai menanam tanaman kayu yang di tanam diluar ladangnya diantaranya Sengon, Mahoni, Jati, Gofasa, Cempaka, Nantu, dan lain sebagainya. Tanaman kayu tersebut akan ditebang pada saat akhir masa *bera*. Kayu hasil penebangan ada yang di pakai sendiri dan ada pula yang sebagian dijual kemasyarakat luar. Dari sisi konservasi, penanaman jenis-jenis tanaman kayu selama menunggu masa *bera* dapat meningkatkan kesuburan tanah dan sekaligus melindungi tanah dan lahannya dari erosi, sedangkan dari segi ekonomi akan meningkatkan pendapatan petani dan sekaligus mengatasi masalah kekurangan kayu. Namun pada hakikatnya kesadaran masyarakat sekitar kawasan masih jauh dari yang diharapkan kesadaran untuk menanam pohon-pohon yang bernilai ekonomis masih kurang, aturan pemerintah (PERDES) serta pengawasan hutan dari instansi terkait masih lemah. kegiatan utama masyarakat berfokus pada

penggunaan lahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Proses membuka lahan Seperti yang tersaji pada gambar 2:



Gambar 2. Cara petani membuka lahan kebun dan ladang

Karakteristik ekonomi peladang di wilayah KPHP unit I

Penduduk

Kecamatan Lolak adalah salah satu kecamatan yang berada di sekitar kawasan hutan dan sampel pada penelitian ini dengan jumlah penduduk 374,5 Jiwa. Dengan kepadatan 70,95 Jiwa/Km². pertumbuhan penduduk di kecamatan Lolak adalah 1,78%. Keluarga pra sejahtera menjadi penting karena akan menjadi subyek dalam pengelolaan kawasan hutan untuk peningkatan kesejahteraan. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 responden yang merupakan sebagian dari warga masyarakat disekitar wilayah KPHP unit I, bahwa pendapatan rumah tangga responden bervariasi mulai dari Rp 1,000,000,- per bulan sampai lebih dari Rp 3,000,000,- per bulan, sedangkan sebagian besar berada di antara Rp 1,000,000,- Rp 2,000,000,- per bulan. Gambaran secara umum pendapatan masyarakat, nilainya relatif cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Selain mengusahakan tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat juga menjadi buruh artinya sambil menunggu masa panen tanaman masyarakat mencari alternatif pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Sebagian kelompok masyarakat pendapatannya relatif memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut. Sebagian kebutuhan konsumsi masih dapat dipenuhi melalui transaksi lainnya yang tidak dalam bentuk uang seperti untuk kebutuhan sayur-mayur dan bumbu-bumbu yang di ambil dari hasil kebun sendiri serta lauk pauk termasuk konsumsi ikan dapat ditangkap dari hasil laut disekitar wilayah desa mereka.

Karakteristik Sosial budaya peladang di wilayah KPHP unit I

Dilihat dari aspek budaya masyarakat sekitar kawasan hutan dapat dilakukan analisis asal masyarakat. Berdasarkan asal masyarakat adalah sebagian masyarakat sekitar hutan berasal dari berbagai suku seperti Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Sanger, Bolangitang, Jawa, Bintauna, Bugis, bali dan lain sebagainya. Pada umumnya kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat suku Mongondow. Walaupun terjadi perbedaan suku namun hal itu tidak

menjadi kendala untuk melakukan interaksi sosial (pembauran). Hal ini disebabkan oleh sifat keterbukaan suku-suku yang ada di Bolaang Mongondow untuk saling menghormati berbagai golongan suku yang lain. Begitu pula halnya dengan keberadaan berbagai suku di perkampungan Desa sampel (Pindol, Pindolili, dan Totabuan). Berdasarkan wawancara di desa sampel tersebut yang merupakan penduduk asli sebesar 73% dan selebihnya 40% adalah masyarakat pendatang (Migrasi) yang telah menjalin hubungan perkawinan dengan masyarakat setempat dan langsung bergabung dengan penduduk asli untuk mencari nafkah. Berdasarkan hasil wawancara masyarakat petani yang membuka lahan dan bercocok tanam di kawasan hutan tidak bertindak sebagai pemilik permanen terhadap lahan garapan namun petani tersebut hanya mengambil hasil dari tanamannya (padi ladang) didaerah hutan tersebut tidak dikenal jual beli atau sewa menyewa tanaman garapan kecuali lahan garapan yang non permanen yang sudah diakui adanya hak milik.

Berbeda pada lahan permanen/intensif sistim jual beli, pinjam pakai lahan garapan telah lama dilakukan masyarakat setempat, walaupun anggapan mereka bukan memperjualbelikan lahan, tetapi hanya memindah tangankan lahan garapan saja. Lahan garapan dapat di wariskan kepada turunannya disamping pewarisan tanaman-tanaman keras yang ada di lokasi lahan tersebut. Cara bagi waris itu adalah dengan bagi rata baik terhadap anak laki-laki ataupun anak perempuan. Selain itu, terdapat pula hak pemilikan yang bersifat sementara, yang terjadi karena ikatan perkawinan, hubungan keluarga atau hubungan baik dengan pemilik tanah. Keadaan demikian dijumpai pada responden yang menggarap lahan milik istrinya atau saudaranya karena lahan miliknya jauh dari tempat tinggalnya.

Pemanfaatan lahan pada kawasan hutan di wilayah KPHP unit I

Pemanfaatan kawasan hutan di wilayah kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I di bagi dalam 2 (dua) kategori yaitu pemanfaatan langsung dan tidak langsung. Struktur dan komposisi jenis tanaman yang menyusun lahan garapan masyarakat tersaji pada Tabel 2. Sebagai berikut:

Tabel 2. Struktur dan Komposisi jenis tanaman yang menyusun lahan garapan masyarakat

Indikator	Gambaran komposisi tanaman tiap lokasi		
	Desa Pindolili	Desa Pindol	Desa Totabuan
	Jenis Tanaman Penyusun Kebun		
Tanaman perkebunan	Kelapa, Aren, Cengkeh, Kemiri	Kelapa, Kakao, Cengkeh, Kopi, Kemiri, vanili, Pala	Kakao, Kelapa, Vanili, Kemiri, Kopi, cengkeh, Pala
MPTS	Durian, Rambutan, Langsat, Matoa, Mangga, Sukun, Pepaya, Pisang	Durian, Langsat, Rambutan, Pisang, Mangga, Matoa, Pepaya, duku	Rambutan, Langsat, Durian, Matoa, Nangka, Pisang, Pepaya, duku, mangga
Palawija	Padi ladang, Jagung, Kacanghijau, Ubi kayu, Kedelai, Kacang tanah, Ubi jalar	Jagung, Padi ladang, Kacang tanah, Kacang hijau, Ubi kayu, Ubi jalar	Jagung, Padi ladang, Ubi jalar, Kacang tanah, kedelai, Kacang hijau
Perkayuan	Nantu, Jabon, Jati, Kayu sirih, Rumbia, Bambu	Kayu sirih, Jabon, Jati, Bambu, Gofasa, Cempaka, Mahoni	Nantu, Jati, Kayu sirih, Mahoni, Gofasa, Bambu, Jabon
Sayuran	Gedi, Terong, Pare, Labu Siam, Ketimun jepang, Cabe, kacang panjang	Gedi, Terong, Ketimun jepang, Cabe, Labu, Kacang panjang	Gedi, Terong, Labu siam, Ketimun jepang, Cabe, Kacang panjang
	Jenis Tanaman penyusun Ladang		
Tanaman perkebunan	Kelapa, Jagung, Pala	Kelapa, Jagung, Pala	Kelapa, Jagung, Vanili, kakao, Pala
MPTS	Durian, Rambutan, Matoa, Mangga, Pisang, Pepaya, Langsat, Duku	Durian, Matoa, Rambutan, Mangga, Pisang, Pepaya, langsat, Duku	Durian, Matoa, Mangga, pisang, Pepaya, Rambutan, Langsat, Duku
Palawija	Padi ladang, Jagung, Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau, Ubi jalar, Ubi kayu	Padi ladang, Jagung, Kedelai, Kacang tanah, Kacang hijau, ubi jalar, Ubi kayu	Padi ladang, Jagung, Kacang tanah, Kacang hijau, Ubi jalar, Ubi kayu
Perkayuan	Nantu, Kayu sirih, Jati, Mahoni, Gofasa, Cempaka, Nantu	Jabon, Kayu sirih, Jati, Mahoni, Gofasa, Nantu	Jabon, kayu sirih, Jati, Mahoni, Nantu, Cempaka

Sumber : Hasil Survey tahun 2016

Strategi pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPHP unit I

Faktor Internal Utama dan Eksternal Utama dalam Analisis SWOT pengelolaan dikawasan hutan wilayah KPHP unit I Kabupaten Bolaang Mongondow

I. Faktor-faktor internal utama

Kekuatan/ Strength (S)

1. Adanya komitmen yang kuat dari lembaga KPH dalam menjalankan tugas.
2. Adanya peraturan perundangan yang menjadi acuan dalam penegakan hukum.

Kelemahan /Weaknesses (W)

1. Keterlibatan stakeholder belum melembaga dalam mendukung kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan hutan.
2. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM).
3. Anggaran Pemerintah pusat/ Propinsi terbatas pada kegiatan pengamanan kawasan
4. Belum lengkapnya peraturan perundangan daerah yang berkaitan dengan pembangunan KPHP

II. Faktor- faktor eksternal utama

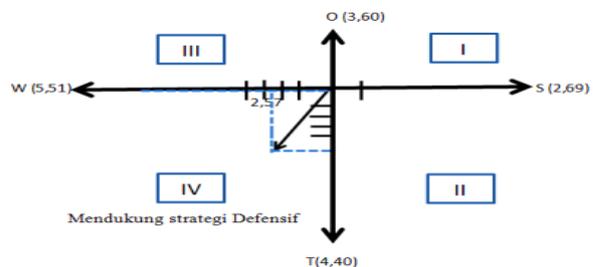
Peluang/Opportunity (O)

1. Adanya dukungan sebagian besar masyarakat untuk memulihkan kondisi kawasan hutan.
2. Umumnya perladangan didalam kawasan menerapkan sistim Agroforestry / kebun campuran.
3. Adanya dukungan cukup baik dari pemerintah setempat.

Ancaman/Treadh (T)

1. Sistem perladangan berpindah oleh masyarakat
2. Adanya klaim lahan dalam kawasan sebagai tanah milik dan diperjualbelikan
3. Pengakuan masyarakat terhadap tata batas kawasan hutan masih rendah.

Berdasarkan hasil perhitungan dan pemilihan faktor keberhasilan prioritas dapat digambarkan peta kekuatan yang ada dalam rangka pengelolaan KPHP unit I.



Gambar 3. Diagram Peta kekuatan pembangunan KPHP unit I berdasarkan Analisis SWOT

Kuadran I,

- Merupakan posisi yang sangat menguntungkan
- KPHP unit I mempunyai peluang dan kekuatan sehingga ia dapat memanfaatkan peluang yang ada secara maksimal

- Seyogyanya menerapkan strategi yang mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif

Kuadran II,

- Meskipun menghadapi berbagai ancaman, KPHP unit I mempunyai keunggulan sumber daya
- Posisi seperti ini dapat menggunakan kekuatannya untuk memanfaatkan peluang jangka panjang
- Dilakukan melalui penggunaan strategi diversifikasi produk atau pasar

Kuadran III,

- KPHP unit I menghadapi peluang pasar yang besar tetapi sumber dayanya lemah
- Karena itu tidak dapat memanfaatkan peluang tersebut secara optimal

Kuadran IV,

- Merupakan situasi yang tidak menguntungkan karena menghadapi ancaman eksternal dan kelemahan internal. Berbagai kelemahan internal (SDM dan pendanaan serta tugas pokok yang lebih pada fungsi perlindungan dan pengamanan) dilain pihak ancaman langsung dan tidak langsung serta rendahnya partisipasi stakeholder daerah menyebabkan berbagai upaya yang telah dilakukan tidak efektif dan berkelanjutan.
- Posisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan kawasan hutan di perhadapkan pada tantangan dan kelemahan yang besar sehingga diperlukan berbagai upaya memperbaiki kelemahan dan mengatasi tantangan sehingga strategi yang dikembangkan adalah strategi defensif dalam arti bagaimana menekan laju perambahan dan melakukan pengelolaan kawasan dengan pendekatan silvikultur intensif yang melibatkan partisipasi masyarakat.

7. Penjabaran dari strategi pengelolaan di KPHP unit I

Untuk dapat mewujudkan strategi perlu penjabaran dari strategi tersebut sehingga kegiatan dilaksanakan dapat menjawab permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut

1. **Strategi**, menjaga komitmen KPHP unit I dan dukungan masyarakat. **Kegiatan**, melakukan diskusi publik dengan melibatkan pihak KPHP unit I dan tokoh masyarakat, **Keluaran**, adanya kesepahaman bersama antara pihak KPHP unit I dengan masyarakat setempat. **Dampak** terwujudnya pengelolaan hutan bersama masyarakat. **Peran**, KPHP unit I, Camat, Kepala desa, NGO dan Tokoh masyarakat, Tokoh adat.
2. **Strategi**, membangun komitmen antara stakeholder untuk menjangkau kesepahaman yang berkaitan dengan upaya-upaya pembangunan KPHP unit I. **Kegiatan**, melakukan diskusi publik dengan melibatkan seluruh stakeholder. **Keluaran**, terjalannya komitmen bersama seluruh stakeholder. **Dampak**, setiap stakeholder dapat menjalankan perannya. **Peran** seluruh stakeholder.
3. **Strategi**, meningkatkan kerjasama antara KPHP unit I dengan masyarakat dan mengakomodir keinginan masyarakat ke dalam kebijakan

pengelolaan hutan. **Kegiatan**, membentuk instansi pengelola KPHP unit I dan menyusun rencana pengelolaan yang bersifat partisipatif. **Keluaran**, terbentuknya organisasi pengelola KPHP unit I dan tersusunnya rencana pengelolaan yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat. **Dampak**, terwujudnya pengelolaan hutan lestari dalam rangka pengelolaan hutan. **Peran**, Bupati, KPHP unit I, BPKH wilayah VI Manado, Akademisi/ Pakar, Bappeda, Camat, Kepala desa, Tokoh masyarakat, Tokoh adat.

4. **Strategi** mensosialisasikan peraturan perundangan kepada stakeholder yang berkaitan dengan KPHP, pengelolaan hutan bersama masyarakat (PHBM) dan kawasan hutan. **Kegiatan**, menyusun kriteria dan standart yang berkaitan dengan pembangunan KPHP, menyusun PERDA yang berkaitan dengan pembangunan KPHP, mensosialisasikan peraturan perundangan yang berlaku kepada seluruh stakeholder. **Dampak** Adanya dasar hukum pelaksanaan pengelolaan, adanya dasar hukum pelaksanaan pengelolaan oleh stakeholder daerah. setiap stakeholder dapat menjalankan perannya. **Peran**, Kementrian kehutanan, Akademisi/ Pakar, Bupati, BPKH wilayah IV Manado.
5. **Strategi** melakukan pembinaan terhadap staf KPHP unit I berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. **Kegiatan**, melakukan pendidikan dan pelatihan kepada staf KPHP unit I yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan. Terbentuknya sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. **Dampak**, terwujudnya pengelolaan hutan secara lestari. **Peran**, Kementrian kehutanan, KPHP unit I, BAPPEDA.
6. **Strategi**, mengalokasikan kegiatan pengelolaan hutan dan lahan. **Kegiatan** melakukan kegiatan DAK, mendorong pengelolaan. **Dampak** Tertanamnya tanaman yang diusahakan oleh pengelola dan masyarakat pada lahan terbuka memberikan keuntungan bagi pengelola dan masyarakat melalui kegiatan pengelolaan. **Peran**, BPDAS, Dinas kehutanan provinsi.
7. **Strategi**, membentuk kelembagaan masyarakat dan pemerintah serta mengumpulkan data tentang keinginan persepsi biofisik dan sosial budaya masyarakat. **Kegiatan**, melakukan kegiatan fasilitasi pembentukan kelembagaan masyarakat, **Dampak**, pembentukan kelembagaan KPHP, melakukan kegiatan inventarisasi sosial budaya, persepsi masyarakat serta keinginan masyarakat dalam rangka pengelolaan KPHP unit I, terkumpulnya data potensi hutan, terkumpulnya data pendukung yang berkaitan dengan pengelolaan. Sebagai wadah masyarakat menyalurkan aspirasi dan sebagai kemitraan pengelolaan KPHP unit I, jelasnya pengelola KPHP unit I, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengelolaan hutan, untuk

mengetahui kelayakan pengelola KPHP unit I dari sisi finansial dan sisi ekonomi, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan pengelolaan hutan. **Peran**, Bupati, Dinas kehutanan provinsi, BPKH wilayah IV Manado.

8. **Strategi**, melakukan survey tataguna lahan Desa di dalam unit KPHP unit I. **Kegiatan**, melakukan survey tata guna lahan **Keluaran**, terpetakannya penggunaan lahan oleh masyarakat saat ini. **Dampak**, sebagai bahan pertimbangan untuk dapat mengambil kebijakan pengelolaan hutan, sebagai bahan dalam penyusunan petak-petak pengelolaan hutan. **Peran**, Dinas perkebunan, BPKH wilayah IV Manado, Tokoh masyarakat, Tokoh adat.
9. **Strategi**, melakukan kegiatan pemetaan terhadap kepemilikan lahan secara partisipatif. **Kegiatan**, melakukan survey kepemilikan lahan di dalam unit kawasan. **Keluaran**, Terpetakannya kepemilikan setiap unit **Dampak**. Sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan. **Peran** Dishut propinsi, Balai Pertanahan Negara (BPN), Kepala desa, NGO, Tokoh adat, Tokoh masyarakat.
10. **Strategi**, melakukan pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan stakeholder yang terkait. **Kegiatan**, pembuatan hutan rakyat, pembuatan kebun rakyat, pembuatan irigasi, terbentuknya persemaian yang di kelola oleh pengelola KPHP dan masyarakat, peningkatan pengetahuan masyarakat tentang bercocok tanam di bidang pertanian dan bidang lainnya, terbentuknya industri rumah tangga yang di kelola masyarakat **Keluaran** terbentuknya hutan yang dikelola oleh masyarakat, adanya irigasi untuk kebutuhan air, pembuatan persemaian, melakukan penyuluhan, pembuatan industri rumah tangga. **Dampak** mengurangi penebangan liar yang dilakukan oknum masyarakat, meningkatkan pendapatan pengelola dan masyarakat dari kegiatan budidaya tanaman kehutanan dan perkebunan serta membentuk kemandirian masyarakat atas kebutuhan bibit unggul. Beralihnya system pertanian masyarakat dari berpindah menjadi menetap dan berkembangnya pola pertanian masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi kebutuhan lahan untuk pertanian oleh masyarakat. **Peran**, BPDAS, Dinas kehutanan Propinsi, Dinas pertanian, Camat, Kepala desa, NGO, Tokoh masyarakat, Tokoh adat, Pakar, Dinas perindustrian dan perdagangan, Dinas koperasi, dan badan usaha lainnya.
11. **Strategi**, melakukan penataan batas dan rekonstruksi kawasan hutan. **Kegiatan**, melakukan kegiatan tata batas, orientasi dan rekonstruksi. **Keluaran**, adanya kejelasan batas kawasan hutan. **Dampak**, adanya batas kawasan hutan yang diakui secara hukum dan diakui oleh stakeholder. **Peran**, Bupati, Dinas Perkebunan, BPKH wilayah IV Manado.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Masyarakat sekitar kawasan hutan di wilayah KPHP unit I memiliki ketergantungan terhadap sumber daya hutan melalui pengambilan kayu bakar, pakan ternak, dan lahan garapan. Sebanyak 77% responden masyarakat sekitar mengetahui penetapan kawasan namun hanya 26% yang mengetahui alasan dan 20% mengetahui tujuan penetapan kawasan wilayah KPHP unit I. Karakteristik sistem perladangan yang dilakukan masyarakat sekitar kawasan hutan mengikuti siklus alamiah dimana kawasan hutan yang dibuka merupakan bekas ladang. Pada etnis tertentu (suku sanger) masih ada beberapa orang melakukan ritual doa untuk memulai beberapa tahapan kegiatan perladangan yaitu pemilihan lahan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan panen.
2. Dari hasil penelitian bahwa sektor pertanian masih merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat. Sektor pertanian terdiri dari sub sektor tanaman pangan, perkebunan, perikanan, dan peternakan. Komoditas yang menonjol dari hasil-hasil tanaman pangan terdiri atas padi/beras dan jagung hasil perkebunan masih mengandalkan kelapa/kopra. Berdasarkan hasil wawancara terhadap 20 responden yang merupakan sebagian dari warga masyarakat disekitar wilayah KPHP unit I, bahwa pendapatan rumah tangga responden bervariasi mulai dari Rp 1,000,000,- per bulan sampai lebih dari Rp 3,000,000,- per bulan, sedangkan sebagian besar berada diantara Rp 1,000,000,- Rp 2,000,000,- per bulan. Gambaran secara umum pendapatan masyarakat, nilainya relatif cukup untuk memenuhi pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Selain mengusahakan tanaman pertanian dan perkebunan masyarakat juga menjadi buruh artinya sambil menunggu masa panen tanaman masyarakat mencari alternatif pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga. Sebagian kelompok masyarakat pendapatannya relatif memadai untuk memenuhi berbagai kebutuhan konsumsi sesuai dengan kondisi di wilayah tersebut. Sebagian kebutuhan konsumsi masih dapat dipenuhi melalui transaksi lainnya yang tidak dalam bentuk uang seperti untuk kebutuhan sayur-mayur dan bumbu-bumbu yang diambil dari hasil kebun sendiri serta lauk pauk termasuk konsumsi ikan dapat di tangkap dari hasil laut di sekitar wilayah desa mereka.
3. Berdasarkan asal masyarakat adalah sebagian masyarakat sekitar hutan berasal dari berbagai suku seperti Mongondow, Minahasa, Gorontalo, Sanger, Bolangitang, Jawa, Bintauna, Bugis, Bali dan lain sebagainya. Pada umumnya kelompok masyarakat ini adalah kelompok masyarakat suku Mongondow. Walaupun terjadi perbedaan suku namun hal itu tidak menjadi kendala untuk

melakukan interaksi sosial (pembauran). Hal ini disebabkan oleh sifat keterbukaan suku-suku yang ada di Bolaang Mongondow untuk saling menghormati berbagai golongan suku yang lain. Begitu pula halnya dengan keberadaan berbagai suku diperkampungan Desa sampel (Pindol, Pindolili, dan Totabuan). Berdasarkan wawancara di Desa sampel tersebut yang merupakan penduduk asli sebesar 73% dan selebihnya 40% adalah masyarakat pendatang (Migrasi) yang telah menjalin hubungan perkawinan dengan masyarakat setempat dan langsung bergabung dengan penduduk asli untuk mencari nafkah.

4. faktor-faktor utama yang akan mempengaruhi kelancaran pengelolaan KPHP unit I dibagi menjadi 2 berdasarkan sumber dari faktor tersebut yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal utama yang bersifat memberi kekuatan adalah kuatnya komitmen KPHP unit I dan adanya peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan KPHP unit I sedangkan yang bersifat melemahkan terhadap pembagunan KPHP unit I adalah keterbatasan sumber daya manusia, belum terbentuknya komitmen stakeholder dan anggaran yang terbatas. Faktor eksternal yang utama yang dapat memberi peluang terhadap pengelolaan KPHP ini adalah dukungan masyarakat terhadap pengelolaan KPHP dan tingginya motivasi masyarakat terhadap pengelolaan KPHP, sedangkan yang bersifat yang mengancam adalah klaim lahan oleh masyarakat atau sistem perladangan berpindah oleh masyarakat.
5. Terdapat 10 strategi yang di perlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi dalam pengelolaan KPHP unit I antara lain:
 - 1) Menjaga komitmen dan menggalang partisipasi masyarakat.
 - 2) Meningkatkan kapasitas pengelolaan wilayah KPHP unit I membangun kerjasama serta program terpadu dan berkelanjutan dengan instansi terkait.
 - 3) Mengembangkan kemitraan terpadu.
 - 4) Mengembangkan tata guna lahan ditingkat desa.
 - 5) Memberdayakan peran LSM, dan tokoh masyarakat sekitar kawasan wilayah KPHP unit I dalam kegiatan pengelolaan kawasan
 - 6) Menetapkan lokasi sasaran prioritas kegiatan pengelolaan yang berdampak langsung bagi perlindungan sistem hidrologis.
 - 7) Mengembangkan jenis-jenis yang memiliki nilai ekonomi dan ekologi.
 - 8) Mengembangkan sistem rehabilitasi dan pembinaan kepada masyarakat secara terpadu lintas sektoral.
 - 9) Membangun dukungan pemerintah daerah Kabupaten dan Provinsi dalam implementasi pengelolaan kawasan hutan di wilayah KPHP unit I.

10) Membangun partisipasi stakeholder dalam pengendalian jual beli lahan kawasan hutan di wilayah KPHP unit I.

6. Permasalahan yang di hadapi dalam pembangunan KPHP unit I sangat kompleks, sehingga diperlukan komiten dari seluruh stakeholder agar dapat memainkan perannya yang disesuaikan dengan bidang tugasnya masing-masing.

Saran

Berdasarkan uraian di atas, maka ada beberapa hal yang disarankan dalam rangka pengelolaan KPHP unit I yaitu:

1. Perlunya komitmen stakeholder dalam peran sebagai mitra pengelola kawasan sekitar hutan.
2. Perlu dibuatkan Perda tentang sistem pengelolaan kesatuan pengelolaan hutan produksi (KPHP) unit I sebagai arahan untuk stakeholder di tingkat Kabupaten.
3. Perlu pelatihan teknis untuk peningkatan kemampuan SDM dalam pengelolaan hutan.
4. Perlu dilakukan penyuluhan dari instansi terkait cara pengolahan tanah dapat juga dilakukan dengan herbisida dan alat sederhana seperti cangkul dan garpu pada musim kering (kemarau), pengolahan tanah dengan garpu untuk membantu membalik tanah dimusim kering akan sangat mengurangi pertumbuhan gulma. Untuk pengendalian gulma diarahkan menggunakan sistem tanam jajar legowo.
5. Perlu meningkatkan kemampuan dan penguasaan masyarakat terhadap teknologi peternakan, menyediakan sarana dan prasarana transportasi dan pemasaran melalui kerjasama antar peternak dalam koperasi ternak serta pengusaha.
6. Peningkatan kemampuan kerajinan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja, Kusnaka. 1983. Kerangka Studi Antropologi Sosial Dalam Pembangunan. Bandung: Tarsito.
- Arkanudin. 2001. Perubahan Sosial Peladang Berpindah Dayak Ribun Parindu Sanggau Kalimantan Barat. Tesis Program Magister Pascasarjana Universitas Padjajaran, Bandung.
- Atsan, T H., B. Isik, F. Yavuz and Z. Yurrtas. 2009. Factors affecting agriculture extention services in Northeast Anatolia Region. African Journal of Agricultural Research Vol. 4 (4), pp.305-310, April, 2009.
- Benjamine, H.E. 2009. Perladangan Berpindah: Bentuk Pertanian Konservasi Pada Wilayah Tropis Basah.2 Mei 2009. Borneojarjua 2008. wordpress. com/2009/05/28/ perladangan-berpindah-bentuk-pertanian-konservasi-pada-wilayah-tropis-basah. 12 Januari 2014.

- BPDAS Tondano. 2014. Review Rencana RTK RHL DAS Di Sulawesi Utara. Laporan Hasil Penelitian.
- Budidarsono, S. 2001. Analisis Nilai Ekonomi Wanatani. Prosiding Lokakarya Wanatani Se Nusa Tenggara. 11 – 14 November 2001. Denpasar Bali.
- Creswell, S. and W. John. 2002, Research Design Qualitative and Quantitative Approaches, Alih Bahasa: Angkatan III dan IV KIK – UI dan bekerjasama dengan Nur Khabibah. KIK Press. Jakarta :
- Darusman, Y. 1995. Perubahan Mata Pencarian Hidup dari Pertanian ke Industri Kerajinan, Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad.
- Dixon, J., A. Gulliver, and D. Gibbon. 2001. Farming System and Poverty: Improving Farmers Livelihood in a changing World. FAO dan World Bank. Rome and Washington D.C. Published Multimedia service, Information Division, FAO, Viale Delle Terme di Caracalla, 00100 Rome, Italy. ISBN 92-5-104627-1 p 409.
- Fox, J.M. 2000. How Blaming ‘Slash and Burn’ Farmers is Deforesting Mainland Southeast Asia. Analysis from The East-West Center 47. pp:1-7.
- Galudra, G., G. Pasya, M Sirait, and C. Fay 2006. Rapid tenur Assesment. Word Agroforestry Centre Asia. Volume I. p11. 24/2- 2010.
- Garna, J.K. 1995. Kearifan Masyarakat Dalam budidaya Dan Penggunaan Lahan: Makalah Dalam Seminar Budaya Dan Budidaya Pertanian: Pelestarian, Perubahan, Dan Pertukaran (Culture dan Agriculture: Preservation, Change and Exchange), Bukittinggi, Departemen Pertanian dan Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan- Direktorat Jenderal Kebudayaan, RI.
- Joyomartono, M. 1991. Perubahan Kebudayaan dan Masyarakat Dalam Pembangunan. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Lauer, Robert.H.1993. Perspektif Tentang Perubahan Sosial(Terjemahan), Jakarta: Rineka Cipta.
- Juo, A.S.R. and Manu, A. 1996. Agriculture, Ecosystems, and Environment : Chemical Dinamic in Slash and Burn Agriculture. 58: 49-60.
- Koerniati, T. 2011. “Pengantar Ekonomi Pertanian”. <http://tatiek.lecture.ub.ac.id/ilmu-amaliah/pengantar-ilmu-ekonomi-pertanian>. 11 Januari 2014.
- Langi, M. dan H. Walangitan. 2013. Kajian akademik pembentukan kelembagaan KPHP Wilayah II Kabupaten Bolaang Mongondow Sulawesi Utara.
- Lubis, Z. 1997. Repong Damar: Kajian Tentang Pengambilan Keputusan Dalam pengelolaan Lahan Hutan Di Pesisir krui, Lampung Barat.
- Masinambow, E.K.M. 1997. Pengantar: Koentjaraningrat dan Antropologi di Indonesia, Jakarta:YIIS. Manginsoli, H. J. 2006. Farm – Level Economic of Soil-Conservation Pratices In The Zomba Rural Development Project of Malawi. Ossrea Publications.
- Miles, M. B. dan Huberman, A.M. 1992. Analisis data kualitatif: Buku sumber tentang Metode – Metode Baru . Terjemahan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. 1992. Jakarta : UI Press.
- Moleong, L.J., 2012. Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: Rosdakarya.
- Moore, W.E. 1967. Order and Change; Essays in Comparative Sociology, New York, John Wiley & Sons.
- Mudiyono. 1990. Perubahan Sosial dan Ekologi Peladang Berpindah, Pontianak: Dalam Suara Almamater Universitas Tanjungpura, No II Tahun V Nopember 1990.
- Pearce, J.A. dan R.B. Robinson 2012. Manajemen Strategis. Edisi ke 12. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Reijntjes. H. 1999. Pertanian Masa depan. Pengantar Untuk Pertanian Berkelanjutan Dengan Input Luar Rendah.
- Salim, H. S, 2004 dasar – Dasar hukum kehutanan. Edisi Revisi. Sinar Grafika. Jakarta.
- Santoso, U. 2013. Dampak Perladangan Berpindah Bagi Kerusakan Ekosistem Hutan. <http://uripsantoso.wordpress.com/2010/10/13/dampak-perladangan-berpindah-bagi-kerusakan-ekosistem-hutan/#more-1980>
- Sayogyo, P. 1985. Sosiologi Pembangunan, Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- Setyawan, S. 1997. Analisis Keputusan Petani Dalam Menerapkan Usaha Konservasi Pada Lahan Berlereng. Studi Kasus Desa Cintaasih, Kabupaten Cianjut Jawa Barat. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. IPB Bogor.
- Silalahi, U. 2010. Metode Penelitian Sosial. Refika Aditama. ASBN 979-1073-9.
- Siregar, H. 2006. *Social – Economic Reasons To Soil conversation : An Econometric Analisis on Cross-Setion Lore Lindu Data*. Jurnal Agro Ekonomi, Volume 24 nomor 1 pp. 1-20.
- Soemarwoto, O. 2004. Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan. Yogyakarta: Penerbit Djambatan.
- Sugiono. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Sunderlin, W.D., D. Sonya and Puntodowo. 2008. Poverty and Forest. Multi – Contry Analysis Of Spatial Asosiation and Proposed policy solotions. Cifor Occasional Paper no. 47.
- Walangitan, H., O. Rotinsulu, dan T. Franz. 2014. Bisnis Plan KPHP Model Poigar. Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Utara.